

PATOLOGI BIROKRASI
(Studi Tentang Problem-Problem Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)

Siti Latifatul Imama, Ya'qub Cikusin, Khoiron
Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi,
Universitas Islam Malang, Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia
LPPM Unisma, Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia
E-mail: ifalatipe@gmail.com

ABSTRAK

Birokrasi adalah struktur organisasi digambarkan dengan hierarki yang pejabatnya di angkat atau di tunjuk, garis tanggungjawab dan kewenangannya diatur oleh peraturan yang diketahui, dan justifikasi setiap keputusan membutuhkan referensi untuk mengetahui kebijakan yang pengesahannya ditentukan oleh pemberi mandat di luar struktur organisasi itu sendiri. Birokrasi tidak bisa dilepaskan dalam sistem pemerintahan, keberadaan birokrasi sampai saat ini masih membawa polemik yang berkepanjangan. Dalam birokrasi tentu saja terdapat problem-problem dalam pengelolaannya, atau biasa disebut penyakit/patologi birokrasi. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui problem-problem birokrasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif yang dimaksud adalah untuk mengetahui fenomena-fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, dan penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) problem-problem birokrasi pengelolaan BUMDes pada Desa Wonorejo masih terdapat problem dalam pengelolaannya yaitu kurangnya dana desa untuk kemajuan BUMDes dan juga belum adanya potensi wisata desa yang dapat dikembangkan. (2) keorganisasian BUMDes pada Desa Wonorejo masih belum ada kerjasama/hubungan baik dengan Kepala Desa dan BPD dan juga dalam BUMDes SDM-nya masih minim dan membutuhkan untuk perekrutan anggota baru. (3) fasilitas BUMDes pada Desa Wonorejo yaitu masih belum adanya gedung/kantor untuk bekerja para karyawan. (4) persepsi masyarakat mengenai problem-problem birokrasi pengelolaan BUMDes yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat dan tujuan BUMDes, dan juga dalam pencairan dan penyaluran BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) masih terdapat keterlambatan, serta pada BUMDes tersebut belum adanya sistem upah untuk para karyawan yang mengakibatkan terdapat dua anggota BUMDes yang mengundurkan diri.

Kata kunci : Patologi Birokrasi, BUMDes, Problem Pengelolaan BUMDes

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Dalam perjalanan bangsa Indonesia, birokrasi tidak bisa dilepaskan dalam sistem pemerintahan. Keberadaan birokrasi sampai saat ini masih membawa polemik yang berkepanjangan. Tuntutan reformasi setidaknya telah merubah wajah birokrasi meskipun belum terlalu signifikan. Agenda reformasi dalam tubuh birokrasi ditujukan bukan lagi sekedar untuk membangun institusi birokrasi yang profesional secara manajerial, namun pada bagaimana birokrasi tersebut mampu merepresentasikan konfigurasi sosial yang ada untuk menjamin keterwakilan masing-masing komunitas sosial yang telah mengakar kuat di dalam tubuh birokrasi.

Jika membicarakan birokrasi maka tidak jauh juga membicarakan tentang penyakit birokrasi atau yang sering disebut patologi birokrasi yang memang bukan hal baru yang terjadi di Indonesia, patologi birokrasi terjadi karena persepsi yang tidak tepat dan

perilaku serta gaya manajerial yang menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi dan dapat menyebabkan timbulnya patologi tertentu dalam birokrasi pemerintahan. Beberapa bentuk patologi birokrasi yang timbul karena persepsi dan gaya manajerial para pejabat yaitu seperti penyelewengan jabatan dan wewenang, kurang tanggungjawabnya seorang pemimpin dalam kepemimpinannya, menerima suap, pembengkakan anggaran, prosedur yang berlebihan sehingga mengakibatkan pelayanan menjadi berbelit-belit dan kurang menguntungkan bagi masyarakat ketika dalam keadaan mendesak, dan masih banyak lagi. Dengan hal ini manajemen birokrasi perlu menciptakan suasana yang kondusif bagi terciptanya iklim kerja aparatur yang profesional. Pimpinan birokrasi perlu menerapkan bentuk-bentuk strategi manajemen organisasi yang mampu membawa organisasi ke arah yang lebih baik dan tanggap terhadap perubahan situasi dan kondisi khususnya di era globalisasi.

Tidak hanya pada pemerintahan pusat saja terjadi adanya patologi birokrasi, bahkan pada pemerintahan daerah pun juga terjadi adanya patologi birokrasi. Kemandirian suatu daerah merupakan tuntutan dari pemerintah pusat saat diberlakukannya otonomi pada masa orde baru yaitu pada tahun 1966 M. Era otonomi ini membuat daerah-daerah yang ada di Indonesia berlomba-lomba untuk menjadi daerah yang terbaik diantara daerah-daerah lainnya. Demi tercapainya keinginan suatu daerah untuk memajukan dan mengembangkan daerahnya serta untuk mensejahterakan masyarakat, maka setiap daerah harus menjalankan pemerintahannya untuk dapat memaksimalkan guna mendukung peningkatan kehidupan yang lebih baik, baik itu dalam bidang ekonomi, sosial maupun politik. Salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. Berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilandasi oleh UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa” dan juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) no. 71 Tahun 2005 Tentang Desa. Pendirian badan usaha desa ini disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (Kabupaten/Kota) yang ikut memfasilitasi dan melindungi usaha masyarakat desa dari ancaman persaingan para pemodal besar. Mengingat badan usaha milik Desa merupakan lembaga ekonomi baru yang berjalan di pedesaan, maka mereka masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. Pembangun landasan bagi pendirian BUMDes adalah Pemerintah, baik pusat ataupun daerah.

Dalam menjalankan BUMDes tentu saja membutuhkan manajemen yang baik agar BUMDes dapat berjalan efektif dan efisien. Karena manajemen merupakan suatu sarana untuk mencapai tujuan organisasi dengan memanfaatkan alat/sarana yang tersedia semaksimal mungkin. Dengan adanya manajemen yang baik maka manajemen kinerja juga sangat diperlukan dalam mensukseskan suatu tujuan yang ingin dicapai. Maka dari itu dengan adanya manajemen kinerja yang baik maka dapat meningkatkan kinerja dari semua potensi yang dimiliki, dan juga manajemen diperlukan untuk kemajuan, dan pertumbuhan serta perkembangan agar lebih baik lagi.

Beberapa fenomena praktek birokrasi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang yaitu kurangnya sarana dan prasarana sehingga BUMDes masih belum berkembang secara

maksimal dan juga kurangnya dukungan dari pemerintah desa, hal ini mempengaruhi terhadap tingkat kualitas BUMDes dan berpengaruh kepada tingkat kesejahteraan masyarakat. Serta lemahnya manajemen dalam pengelolaan BUMDes di Desa tersebut.

Ketua BUMDes pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang mengatakan bahwa manajemen kinerja BUMDes pada Desa Wonorejo masih buruk karena kurangnya anggota dalam kepengurusan BUMDes hal ini dikarenakan ada beberapa anggota yang mengundurkan diri dari kepengurusan BUMDes, dengan demikian setiap anggota BUMDes yang ada saat ini, mereka merangkap jabatan. Dan dalam BUMDes ini masih belum memiliki tujuan yang pasti maksudnya yaitu belum ada planning untuk kegiatan selanjutnya, jadi pada setiap kegiatan berjalan begitu saja, dan hal ini mengakibatkan BUMDes pada Desa Wonorejo belum berkembang dengan baik. (wawancara, 15 Desember 2018)

Disisi lain, salah satu anggota BUMDes Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang juga mengatakan bahwasannya manajemen kinerja BUMDes pada Desa Wonorejo masih belum maksimal dan bisa dikatakan buruk karena belum adanya kantor/tempat untuk mengoptimalkan segala kegiatan BUMDes dan menghambat seluruh pengurus untuk mengadakan rapat atau semacamnya. Hal ini mengakibatkan manajemen kinerja BUMDes menjadi lemah. (wawancara, 15 Desember 2018)

Ada beberapa persepsi masyarakat mengenai problem-problem birokrasi pengelolaan BUMDes di Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. *Pertama* yaitu mengatakan bahwa belum adanya sosialisasi tentang manfaat dan tujuan BUMDes kepada masyarakat sehingga mengakibatkan BUMDes belum dikenal secara mendalam oleh masyarakat setempat. (wawancara, 15 Januari 2019)

Kedua yaitu juga mengatakan bahwasannya BUMDes di Desa Wonorejo belum adanya sosialisasi mengenai manfaat dan tujuan BUMDes, karena dengan adanya sosialisasi mungkin bisa lebih meningkatkan kualitas BUMDes di Desa Wonorejo tersebut, dan juga masyarakat mengetahui bahwa BUMDes hanya menyalurkan sembako kepada masyarakat yang berkekurangan padahal ada beberapa manfaat BUMDes bagi seluruh masyarakat. Untuk itu sangat diperlukan sekali adanya sosialisasi mengenai BUMDes kepada masyarakat. (wawancara, 15 Januari 2019)

Ketiga yaitu mengatakan bahwa belum adanya upah untuk pengurus BUMDes sehingga mengakibatkan manajemen kinerja pengurus BUMDes tidak maksimal bahkan ada pengurus yang

keluar dai kepengurusan BUMDes. Dan juga BUMDes di Desa Wonorejo tersebut belum adanya sosialisai kepada masyarakat, hal ini banyak masyarakat yang meremehkan akan keberadaan BUMDes di Desa tersebut padahal ada banyak manfaat yang terkandung dalam keberadaan BUMDes di Desa tersebut seperti halnya mengembangkan potensi desa serta mensejahterakan masyarakat. (wawancara, 15 Januari 2019)

Dari pemaparan diatas peneliti tertarik untuk mengambil judul **“PATOLOGI BIROKRASI (Studi Tentang Problem-Problem Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)”**.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana problem-problem birokrasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui problem-problem birokrasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Bogdan & Biklen, S. (1992: 21-22) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.

Peneliti memilih jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara jelas dan nyata apa yang terjadi dilapangan secara menyeluruh, kemudian mengungkapkan secara deskriptif tentang Patologi Birokrasi (Studi Tentang Problem-Problem Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang).

Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini yaitu tempat dimana peneliti menangkap fenomena dari objek yang diteliti untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan. Adapun lokasi yang dipilih yaitu Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.

Dari aparaturnya desa inilah peneliti mendapatkan segala informasi dalam objek penelitian tentang Patologi Birokrasi (Studi Tentang Problem-Problem Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang).

Subjek Penelitian

Subjek penelitian menurut Arikonto tahun (2016: 26) memberi batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang di permasalahkan. Dalam sebuah penelitian, subjek penelitian mempunyai peran yang sangat strategis karena pada subjek penelitian, itulah data tentang variabel yang penelitian amati. Pada penelitian kualitatif responden atau subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Adapun subjek dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa, Ketua BUMDes, dan masyarakat.

Fokus Penelitian

Moloeng (2000), mengemukakan bahwa fokus penelitian di maksudkan untuk membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan yang tidak relevan, agar tidak di masukkan ke dalam sejumlah data yang sedang di kumpulkan, walaupun data itu menarik. Perumusan fokus masalah dalam penelitian kualitatif bersifat tentatif, artinya penyempurnaan rumusan fokus atau masalah masih tetap di lakukan sewaktu penelitian sudah berada di lapangan. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. Mengidentifikasi Problem-Problem Birokrasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.
 - 1.1 Kurangnya dana desa
 - 1.2 Belum ada potensi wisata desa yang dikembangkan
2. Mengidentifikasi tentang bagaimana keorganisasian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.
 - 1.1 Belum adanya kerjasama yang baik
 - 1.2 Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM)
3. Mengidentifikasi tentang bagaimana Fasilitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.
 - 1.1 Belum ada gedung/kantor
4. Mengidentifikasi persepsi masyarakat mengenai Problem-Problem Birokrasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Desa

- Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.
- 1.2 Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat
 - 1.3 Lambatnya pencairan BPNT
 - 1.4 Belum adanya sistem upah

Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

- a. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Ketua BUMDes, serta Masyarakat Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.
- b. Sumber data skunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media pertama atau data yang diperoleh dan dicatat oleh pihak lain yang telah disusun dan dipublikasikan. Data tersebut dapat diperoleh melalui tulisan, tabel, gambar, dokumen dan simbol-simbol lain.

Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2015:224) mengatakan bahwa “teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian yaitu mendapatkan data”. Untuk memperoleh data yang memenuhi standar, maka peneliti harus mengetahui strategi pengumpulan data yang tepat.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi
Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistimatis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti. Dengan demikian metode observasi bisa digunakan dan dilakukan untuk melihat dan mengamati fenomena-fenomena yang dimaksud yang akan turut menentukan hasil dari penelitian yang ada. Adapun observasi yang digunakan adalah observasi non partisan yaitu suatu kegiatan observasi dimana peneliti tidak aktif di dalam kegiatan dari obyek yang diteliti.
2. Wawancara
Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang di selenggarakan atau di lakukan dengan cara tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan informan. Wawancara mendalam juga digunakan untuk memperoleh data-data mengenai Patologi Birokrasi (Studi Tentang

Problem-Problem Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang).

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data melalui menghimpun data yang tertulis dan tercetak. Menurut Arikunto (2010:274) metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat agenda dan sebagainya.

Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. Data bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau tulisan), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis. Menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014:14), kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan data yang diperoleh peneliti melalui wawancara, observasi dan dokumentasi direduksi dengan cara merangkum, memilih dan memfokuskan data pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian.

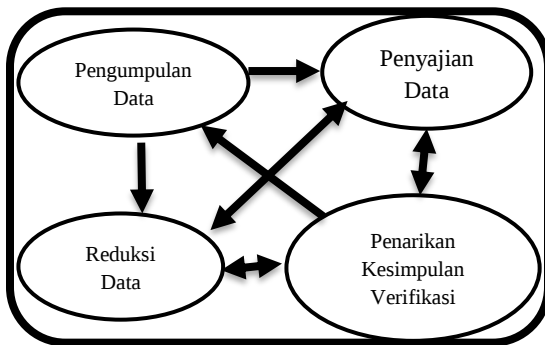
2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan setelah data selesai direduksi atau dirangkum. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dianalisis kemudian dalam bentuk catatan wawancara, catatan lapangan dan catatan dokumentasi. Data yang sudah disajikan dalam bentuk catatan wawancara, catatan lapangan catatan dokumentasi diberi kode untuk mengorganisasi data, sehingga peneliti dapat menganalisis dengan cepat dan mudah. Peneliti membuat daftar awal kode yang sesuai dengan pedoman wawancara, observasi dan dokumentasi. Masing-masing data yang sudah diberi kode dianalisis dalam bentuk refleksi dan disajikan dalam bentuk teks.

3. Kesimpulan, Penarikan atau Verifikasi

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif model interaktif adalah penarikan kesimpulan dari verifikasi. Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah diungkapkan oleh peneliti sejak awal.

Adapun model analisis data interaktif Miles, Huberman dan Saldana dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif. Sumber: Miles dan Huberman (Miles, Huberman dan Saldana, 2014:14)

Teknik Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2007).

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji credibility, transferability, dependability, dan confirmability (Sugiyono, 2007).

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan yaitu:

1. Uji Kredibilitas

Dalam bukunya, Sugiono (2012) menjelaskan uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan:

a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas atau kepercayaan data. Dengan

perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap. Setelah dicek kembali ke lapangan data yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan/benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri.

b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik, sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum. Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan cara demikian, maka peneliti akan semakin cermat dalam membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan semakin berkualitas.

c. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Triangulasi di bagi menjadi 3, yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah pengujian untuk menguji kredibilitas data, dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah pengujian yang dilakukan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik dengan berbeda.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid

- d. Analisis Kasus Negatif
Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya.
 - e. Menggunakan Bahan Referensi
Bahan referensi yang dimaksud adalah adanya data pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti.
 - f. Mengadakan Member Check
Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan member check adalah untuk mengetahui apakah data atau informasi yang diperoleh dan yang akan digunakan nantinya sudah sesuai dengan apa yang dimaksud oleh narasumber. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti data yang berada didalam data tersebut valid, sehingga data tersebut semakin kredibel/dapat dipercaya.
2. Uji Dependability
Dalam penelitian kuantitatif, dependability disebut reliabilitas. Suatu penelitian dapat dikatakan reliable, apabila orang lain dapat mengulangi/mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji dependability dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.
 3. Uji Konfirmability
Dalam penelitian kualitatif, uji konfirmability mirip dengan uji dependability, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji konfirmability berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar konfirmability. Dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada, tetapi hasilnya ada.

PEMBAHASAN

1. Problem-Problem Birokrasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

1.1 Kurangnya Dana Desa

Santosa (2008: 339) mengemukakan bahwasannya Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai Program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi tersebut, maka setiap Kabupaten/Kota mengalokasikan kepada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa.

Dana desa merupakan pokok penunjang dalam mendanai infrastruktur vital dan pokok penunjang fasilitas-fasilitas desa yang harus direvitalisasi demi mendorong kemajuan sumber daya ekonomi desa dan kemajuan sumber daya lainnya. Dan dana desa dibagi untuk beberapa organisasi yang ada di desa. Dan itu pasti ada pembagian dana yang masih belum cukup untuk pembangunan suatu organisasi.

BUMDes pada Desa Wonorejo yaitu kurangnya dana dari desa untuk suatu proses perkembangan BUMDes dan selama ini BUMDes menggunakan dana peralihan dari dana pilkades tahun 2019, akan tetapi dari tahun 2017 sudah dianggarkan dana untuk BUMDes pada tahun 2018 dan masih kurang untuk perkembangan BUMDes sendiri. Dan hal tersebut mengakibatkan BUMDes belum berkembang hingga saat ini.

Dengan demikian perkembangan BUMDes masih terhambat oleh dana yang belum mencukupi. Hal ini mengakibatkan BUMDes masih belum sesuai dengan konsep yang disampaikan oleh Santosa, karena Dana Desa masih belum sepenuhnya membiayai program Pemerintahan Desa serta pemberdayaan masyarakat. Dan juga perkembangan BUMDes yang masih stagnan artinya belum berkembang secara pesat dan ini mengakibatkan kualitas BUMDes masih rendah.

1.2 Belum Ada Potensi Wisata yang Dikembangkan

Salah satu ciri dari desa yang masih berada dalam tingkatan desa berpotensi untuk tingkatan desa wisata adalah masih adanya masyarakat yang kurang memahami potensi yang berada di desanya. Perlu adanya pemahaman bagi warga untuk memahami manfaat pengembangan desa sebagai desa wisata yang mana mungkin tidak semua akan menerima pada awalnya.

Terdapat beberapa dimensi dalam perencanaan pengembangan desa yang *pertama* tata ruang desa, *kedua* perekonomian desa, dimana hal ini dapat meningkatkan penghidupan masyarakat dan pembangunan sarana ekonomi

berbasis potensi lokal, *ketiga* sosial budaya desa, dimana dapat menjadikan penguat adat istiadat setempat. (Panggunharjo.com)

BUMDes pada Desa Wonorejo masih belum menemukan potensi wisata desa untuk dikembangkan karena masyarakat lebih mementingkan ekosistem alam untuk makanan hewan ternak masyarakat sendiri, yang mana sebenarnya ekosistem alam tersebut dapat dikembangkan menjadi wisata seperti wisata-wisata yang lagi viral saat ini. Dengan begitu BUMDes masih belum ada potensi wisata yang dikembangkan, dimana wisata ini merupakan sorotan utama bagi kemajuan BUMDes.

Dengan begitu BUMDes pada Desa Wonorejo masih belum sesuai dengan beberapa dimensi diatas karena belum adanya kesadaran masyarakat apabila potensi wisata ini berkembang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat serta dapat mengenalkan budaya yang ada pada desa tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya penjelasan atau penyampaian mengenai manfaat pengembangan desa sebagai desa wisata yang nantinya akan dirasakan oleh warga.

2. Keorganisasian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

2.1 Belum Adanya Kerjasama yang Baik

Sebagaimana Menurut Chester I. Bernard (dalam Sutarto 1991:22), organisasi adalah suatu sistem tentang aktivitas-aktivitas kerjasama dua orang atau lebih sesuatu yang tidak berwujud dan bersifat pribadi, sebagian besar mengenai hubungan-hubungan.

Hasil temuan peneliti bahwasannya hubungan/kerjasama pada BUMDes Desa Wonorejo belum berjalan secara maksimal antara Kepala Desa, BPD dan Ketua BUMDes hal ini dikarenakan adanya miskomunikasi antara tiga elemen tersebut. Dan juga BUMDes sudah menjalankan prinsip manajemen perencanaan meskipun ada beberapa yang belum terlaksana sesuai dengan perencanaan.

Dengan demikian BUMDes pada Desa Wonorejo masih belum sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh Chester I. Bernard karena pada BUMDes ini masih belum adanya aktivitas-aktivitas kerjasama dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan BUMDes tersebut.

Oleh karena itu, BUMDes pada Desa Wonorejo perlu adanya komunikasi yang baik antara bawahan dan atasan agar semuanya dapat terkontrol dengan baik. Dan apabila hal tersebut tidak dilaksanakan maka akan menimbulkan kesalahpahaman, kesalahan informasi, memberikan kesan yang negatif serta

merenggangkan hubungan sosial. Dan dengan begitu penting bagi semua organisasi atau perusahaan agar mampu menciptakan komunikasi yang baik antar atasan dan bawahan.

2.2 Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam pembangunan. Oleh karena itu dalam melaksanakan pembangunan suatu wilayah atau negara perlu diketahui keadaan sumber daya manusia yang ada di wilayah tersebut. Semakin lengkap dan tepat data mengenai sumber daya manusia yang tersedia, semakin mudah dan tepat pula perencanaan pembangunan yang di buat.

Sonny Sumarsono (2003, hal 4), Sumber Daya Manusia atau *human resources* mengandung dua pengertian. *Pertama*, adalah usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal lain SDM mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Pengertian *kedua*, SDM menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai kegiatan ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau masyarakat.

BUMDes pada Desa Wonorejo dalam hal SDM masih sangat minim untuk itu perlu diadakannya perekrutan ulang untuk anggota BUMDes karena selama ini BUMDes kesusahan untuk menjalankan pekerjaannya karena tidak ada pembagian kerja yang baik dan pegawai tidak fokus dalam satu pekerjaan saja, dan hal tersebut proses perkembangan BUMDes menjadi terhambat.

Hal ini BUMDes masih belum sesuai dengan konsep Sonny Sumarsono karena pada BUMDes ini SDM-nya belum memadai sehingga proses produksi menjadi terhambat. Dengan demikian kualitas sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam setiap gerak pembangunan. Hanya dari sumber daya manusia yang berkualitas tinggilah yang dapat mempercepat pembangunan dalam suatu organisasi. Apabila SDM rendah maka perkembangan suatu organisasi akan terhambat.

3. Fasilitas Kerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

3.1 Belum ada Gedung/Kantor

Fasilitas kerja merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan untuk menambah semangat, kenyamanan dan kesenangan karyawan dalam bekerja, terutama gedung/kantor untuk bekerja,

karena jika kantor belum terpenuhi maka karyawan akan merasa tidak nyaman dalam bekerja sehingga mengakibatkan lemahnya manajemen kinerja pegawai.

Suad Husnan (2002: 187) mengemukakan bahwasannya fasilitas kerja merupakan suatu bentuk pelayanan perusahaan terhadap karyawan agar menunjang kinerja dalam memenuhi kebutuhan karyawan, sehingga dapat meningkatkan produktifitas kerja karyawan, dan juga dengan adanya fasilitas kerja yang disediakan oleh perusahaan sangat mendukung karyawan dalam bekerja.

BUMDes pada Desa Wonorejo, fasilitas kerja anggota masih belum memadai khususnya gedung/kantor BUMDes karena memang kurangnya dana untuk pembangunan. Hingga saat ini kantor masih menyewa dan bahkan kantor tersebut banyak yang bocor pada musim penghujan sehingga tidak bisa digunakan untuk menyimpan serta menyalurkan BPNT. Dengan belum adanya kantor mengakibatkan menurunnya manajemen kinerja pegawai BUMDes dan mengakibatkan dua anggota BUMDes mengundurkan diri. Dan apabila kantor BUMDes sudah dibangun dan sudah maksimal, masyarakat yang memiliki produk yang bisa dijual belikan dapat dikumpulkan menjadi satu di kantor BUMDes untuk dijual, hal tersebut mempermudah masyarakat tanpa menitipkan produknya ke toko-toko yang lain.

Hal ini BUMDes masih belum sesuai dengan konsep yang disampaikan oleh Suad Husnan karena BUMDes pada Desa Wonorejo fasilitas kerja masih belum terpenuhi secara maksimal dan belum memberikan kenyamanan kepada pegawai. Dengan demikian fasilitas kerja terutama kantor kerja sangat berpengaruh dalam kinerja pegawai, karena dapat menumbuhkan semangat, kenyamanan serta kepuasan pegawai dalam bekerja dan mungkin tidak menimbulkan adanya anggota yang mengundurkan diri, sehingga pegawai dapat bekerja sesuai job mereka masing-masing tanpa adanya rangkap jabatan.

4. Persepsi Masyarakat mengenai Problem-Problem Birokrasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

4.1 Kurangnya Sosialisasi kepada Masyarakat

Sosialisasi yaitu proses pembelajaran yang dilakukan seseorang untuk mengenal lingkungan sekitarnya baik itu lingkungan fisik maupun sosial. Dengan sosialisasi dapat memfahamkan apa tujuan dan manfaat sesuai dari materi yang disosialisasikan. Prof. Dr. Nasution, S.H. Mengemukakan bahwasannya sosialisasi merupakan proses membimbing individu ke dalam

dunia sosial (sebagai warga masyarakat yang dewasa).

BUMDes pada Desa Wonorejo masih belum mengadakan sosialisasi secara mendalam kepada masyarakat mengenai manfaat dan tujuan BUMDes, dan ini mengakibatkan masyarakat mengetahui BUMDes hanya sebatas penyaluran sembako kepada masyarakat yang kurang mampu yang mana sebenarnya dengan adanya BUMDes dapat membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat yang pengangguran karena masyarakat dapat menggali lagi potensi mereka masing-masing, seperti membuat kerajinan tangan atau membuat kue yang menarik yang bisa untuk dijual belikan dan menghasilkan uang.

Dengan demikian BUMDes pada Desa Wonorejo masih belum sesuai dengan konsep yang disampaikan oleh Nasution karena belum membimbing masyarakat ke dunia sosial. Oleh karena itu, sosialisasi kepada masyarakat sangat dibutuhkan karena dengan sosialisasi masyarakat dapat memahami apa itu BUMDes serta dapat menyampaikan manfaat-manfaat BUMDes secara detail dan mendalam. Proses sosialisasi dapat dimaknai sebagai membuka pintu gerbang komunitas agar BUMDes dapat diterima dan mendapat sambutan dengan baik. Hal ini akan menentukan dukungan dan keterlibatan masyarakat. Keadaan demikian menjadi dasar yang kuat bagi terjalinnya hubungan kemitraan dengan masyarakat.

4.2 Lambatnya Pencairan BPNT

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada masyarakat melalui BUMDes, BPNT ini disalurkan setiap bulan kepada masyarakat.

Peraturan Presiden RI No. 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, bahwa penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat dilakukan secara efisien agar dapat diterima tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat administrasi. Dan juga dapat mendukung peningkatan manfaat bagi penerima bantuan serta berkontribusi terhadap peningkatan keuangan inklusif.

BUMDes pada Desa Wonorejo dalam penyaluran BPNT terdapat kelambatan dalam penyalurannya, hal tersebut banyak masyarakat yang meresahkan akan lambatnya pencairan dan penyaluran BPNT dan juga jika jaringan trouble masyarakat tidak dapat mengambil BPNT tersebut sesuai waktu yang ditentukan. Untuk itu yang dapat masyarakat lakukan yaitu hanya bersabar sampai BPNT tersebut datang dan siap untuk disalurkan.

Hal ini BUMDes pada Desa Wonorejo sudah sesuai dengan perpres no. 63 tahun 2017 karena penyaluran BPNT sudah tepat sasaran, tetap jumlah dan tepat administrasi. Akan tetapi penyaluran BPNT pada Desa Wonorejo masih terdapat ketelambatan.

Dengan demikian terdapat beberapa manfaat dari BPNT yaitu meningkatkannya ketahanan pangan ditingkat KPM (Keluarga Penerima Manfaat) sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial serta meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.

4.3 Belum Adanya Sistem Upah

"Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha/pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan di bayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan." (Undang Undang Tenaga Kerja No.13 Tahun 2000, Bab I, pasal 1, Ayat 30)

BUMDes pada Desa Wonorejo belum ada sistem upah bagi pekerjanya hal tersebut mengakibatkan terdapat anggota BUMDes yang mengundurkan diri karena mereka merasa dirugikan selama bekerja di BUMDes pada Desa Wonorejo.

Hal ini BUMDes masih belum sesuai dengan UU tentang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2000, Bab I, pasal 1 Ayat 30. Bahwasannya BUMDes pada Desa Wonorejo belum memberikn upah kepada pekerja karena upah merupakan jasa yang telah mereka lakukan/kerjakan.Oleh karena itu perlu diadakannya sistem upah pada BUMDes tersebut karena untuk kepuasan pekerja dalam bekerja serta upah merupakan bentuk apresiasi atas kerja pegawai dan pegawai tidak merasa dirugikan. Dan ini agar BUMDes dapat maju dengan termaksimalkannya kinerja pegawai.

Berdasarkan pembahasan diatas BUMDes pada Desa Wonorejo masih terdapat problem-problem Birokrasi. Problem Birokrasi bisa diartikan sama dengan Patologi Birokrasi/Penyakit Birokrasi. Peran birokrasi sebagai implementor dari kebijakan politik atau dengan kata lain birokrasi sebagai penyelenggara pemerintahan, maka patologi birokrasi dapat diartikan sebagai persoalan atau permasalahan yang terjadi dalam

penyelenggaraan pemerintahan akibat kinerja birokrasi tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan publik dengan baik.

Perilaku birokrasi yang bersifat patologis bukanlah merupakan hal yang berdiri sendiri, tetapi merupakan hasil interaksi antara berbagai aspek, seperti aspek birokrasi dan aspek individu yang ada dalam lingkungan. Aspek individu membawa ke tatanan birokrasi, kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan, kebutuhan, dan pengalaman masa lainnya. Ini semua merupakan karakteristik individu, sedangkan karakteristik birokrasi terdiri dari susunan hirarki, adanya pembagian kerja, adanya tugas-tugas dalam jabatan tertentu, adanya wewenang dan tanggung jawab, adanya sistem penggajian tertentu, adanya sistem pengendalian. Jika karakteristik individu yang dikemukakan berinteraksi dengan karakteristik birokrasi, maka timbullah perilaku birokrasi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. BUMDes pada Desa Wonorejo masih terdapat banyak problem birokrasi pengelolaan BUMDes dan hingga saat ini masih belum teratasi problem-problem tersebut sehingga mengakibatkan BUMDes belum berkembang secara maksimal.
2. Keorganisasian BUMDes masih kurang adanya kerja sama antar Kepala Desa, anggota BUMDes serta aparat desa, dan juga SDM pada BUMDes sangat kurang karena ada 2 anggota BUMDes yang mengundurkan diri sehingga terdapat rangkap jabatan pada keorganisasian BUMDes yang mengakibatkan manajemen kinerja pegawai lemah.
3. Fasilitas kerja masih belum memadai khususnya pada tempat/kantor yang memang belum dibangun karena kurangnya dana untuk proses pembangunannya. Hingga saat ini kantor BUMDes masih menyewa akan tetapi kantor tersebut terdapat banyak bocor pada saat hujan. Oleh karena itu kantor tersebut tidak bisa digunakan untuk menyimpan dan penyaluran BPNT.
4. Persepsi masyarakat mengatakan bahwasannya BUMDes belum ada sosialisasi secara mendetail mengenai manfaat dan tujuan BUMDes dimana BUMDes ini sebenarnya banyak sekali manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat. Serta BUMDes masih sring adanya keterlambatan dalam pencairan dan penyaluran BPNT.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti dapat memberi saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah desa mengenai problem-problem birokrasi pengelolaan BUMDes perlu adanya perbaikan agar BUMDes di Desa Wonorejo dapat berkembang dan kualitas BUMDes meningkat, sehingga kesejahteraan masyarakat untuk membuka peluang kerja menjadi luas.
2. Bagi masyarakat yang belum aktif seharusnya lebih tanggap lagi terhadap permasalahan yang terjadi pada pemerintahan desa supaya bisa mendapatkan informasi yang sesuai dengan yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Moleong, Lexi. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Thoha, Miftah. 2008. *Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi*. Jakarta : Kencana.
- Thoha, Miftah. 1991. *Beberapa Aspek Kebijakan Birokrasi*. Yogyakarta : PT. Media Widya Mandala.

Sumber Skripsi

- Dumayanti Batubara. 2018. *Patologi Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Absen Elektronik Sidik Jari (Finger Print) di Dinas Perdagangan Kota Medan*.
- Hamirul. 2017. *Patologi Birokrasi Yang Dimanifestasikan Dalam Perilaku Birokrat Yang Bersifat Disfungsional (Studi pada Kantor Pertahanan Cimahi)*.
- Rina, Nunik dan Dwi. 2012. *Patologi Birokrasi di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Semarang*.

Sumber Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

- Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Permendes No. 4/2015 mengenai BUMDes
- Peraturan Pemerintah (PP) no. 71 Tahun 2005 Tentang Desa
- Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai
- Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2000, Bab I, Pasal 1, Ayat 30

Sumber Internet

- Anonim. 2018. *Ramainya Rejeki BUMDes dengan Mendirikan Pasar Desa*. <http://www.berdesa.com/ramainya-rejeki-bumdes-mendirikan-pasar-desa/>. (Online). Diakses pada tanggal 26 Desember 2018.
- Anonim. *Otonomi Daerah*. <http://id.m.wikipedia.com>. (Online). Diakses pada tanggal 20 November 2018.
- Yulanda, Jihan. 2013. *Patologi Birokrasi*. <https://jihanyulanda16.wordpress.com/2013/12/11/patologi-birokrasi/>. (online). Diakses pada tanggal 31 Desember 2018.
- Noviati, Piping. 2011. *Patologi Birokrasi di Indonesia*. <https://pipingnoviati.wordpress.com/2011/12/22/patologi-birokrasi-di-indonesia-2/>. (Online). Diakses pada tanggal 31 Desember 2018.
- Humas, Rahman. 2011. *Fungsikan Manajemen dalam Birokrasi*. <http://rahmanhumas.blogspot.com/2011/08/fungsikan-manajemen-dalam-birokrasi.html>. (Online). Diakses pada tanggal 02 Januari 2018